

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Hamid S. A. Attamimi, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Siti Soetami, 1993, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ade Armando, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara Dan Pidana Khusus Korupsi)*, Cetakan Pertama, Satara Press, Malang.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfin Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Pangerang dan Syafa'at, 2018, *Pokok- Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Constantijn S.J.M, Kortmann and Paul PT. Bovend'Eert, 2000, *Dutch Constitutional Law*, Kluwer Law International.
- Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hengki Andora, 2021, *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Konsep dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Herman Finer, 1962, *The Major of Governments of Modern Europe*, Haper and Row, Publisher, New York, and London.

I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang.

Ikhwan Fahrojih, 2016, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR*, Intrans Publishing, Malang.

John Salindeho, dalam Ikhwan Fahrojih, 2016, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR*, Intrans Publishing, Malang.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Mac Iver, 1950, *The Modern State*, Oxford University Press, London.

Moenek dan Suwanda, 2019, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhammad Djumhana, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, PT Citra Aditya, Bandung.

P. de Haan, 1996, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, deel 1, Kluwer Devender.

Philipus M Hhadjon dkk, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta.

Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Widodo, 2017, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yuswar dan Mulyadi, 2003, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

### C. JURNAL

Athiya dan Mulia, *Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2015-2019*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol.6 No.1 Februari 2021.

Bachtiar dan Tono, *Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas*, Jurnal Yudisial Vol. 11 NO.2 Agustus 2018.

Beni Kurnia dan Ikhsan Alia, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan BPK*, Jurnal Hukum, Vol.3 No.2 Desember 2017

Chandra Aritonang, *Hukum Administrasi Negara Sebagai Himpunan Peraturan-Peraturan Istimewa*, Vol.5 No.1 April 2019.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Islam dan Tradisi Negara Konstitusi*, Makalah pada Seminar Indonesia-Malaysia, UIN/IAIN Padang.

La Ode Husen, *Jurnal Konstitusi Tanggung : Akuntabilitas Dan Pengawasan Dalam Negara Hukum Demokratis Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011.

Ridho dan Wessy, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah*, Desember 2021.

Tengku Erwinsyahbada, et al. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", *Lentera Hukum* Vol 5 Issue 2, 2018.

### D. WEBSITE

Faathir Afif, "*Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember*",  
<http://repository.unmuhjember.ac.id/271/1/ARTIKEL.pdf>, diakses pada 14 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.

Rahmi, David, Hendrik, *Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*, Vol.8 No.1 *GoodWill* Vo.8 No.1 Juni 2017.

Sugih dan Mulki, *Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan, Vol.1 No.1, 2021

[http://inspirasi.hukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawabanadministrasi-negara\\_23.html](http://inspirasi.hukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawabanadministrasi-negara_23.html), diakses pada 10 Mei 2023 pukul 14.00 WIB.

<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/2416/2002>, diakses pada 12 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.

<https://repository.usu.ac.id/bitstream/12345678/351771/Chapter%.2011.pdf>, Diakses pada 21 Oktober 2022, pukul 10.25 WIB.

<https://sumbar.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-ihps/>, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB.

<https://sumbar.bpk.go.id/tindaklanjuti-temuan-lhp-pemprov-rp-125-miliar-dprd-sumbar-bentuk-pansus/>, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 12.00 WIB.

<https://sumbar.bpk.go.id/potensi-penyelewengan-dana-covid-19-penegak-hukum-lirik-lhp-bpk-sumbar/>, diakses pada 1 Desember 2022.

<https://text-id.123dok.com/document/7q01lg39z-hubungan-han-dengan-ilmu-hukum-lainnya.html>, diakses pada 12 Mei 2023 pukul 14.00 WIB.

